

FUNGSI PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN KAPAL FERRY TRADISIONAL DI DESA PERJIWA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Suparmin¹

Abstrak

Suparmin, Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Keselamatan Penumpang Angkutan Penyeberangan kapal Ferry Tradisional di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Sutajdi. MM selaku pembimbing I dan Dra. Lisbet Situmorang. M. Si selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai mana proses pengawasan yang dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara mengenai fungsi pengawasan dalam meningkatkan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang. Dengan fokus penelitian yang meliputi : pengawasan langsung dengan inspeksi langsung, observasi ditempat, dan laporan ditempat. Serta pengawasan tidak langsung meliputi laporan tertulis dan laporan lisan.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memaparkan/ menggambarkan tentang bagai mana tugas pokok Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara dalam hal ini pengawasan sebagai pemegang penuh tanggung jawab dipenyeberangan kapal ferry tradisional di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis data Model Interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Faisal.

Penelitian ini memperoleh gambaran yaitu dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan dalam meningkatkan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional, Dinas Perhubungan sudah memaksimalkan pengawasannya di setiap pelabuhan yang mengadakan aktifitas penyeberangan. Dengan cara mengadakan inspeksi langsung, melakukan observasi ditempat, dan laporan ditempat. Inspeksi langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu hampir setiap hari yaitu dengan di bantu oleh petugas lapangan dan staf-staf lainnya yang tergabung dalam sebuah tim yang ada di Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara.

Kata Kunci : *pengawasan, keselamatan, sarana angkutan penyeberangan sungai*

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: suparmins06@gmail.com

Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Pemerintahan daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat haruslah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah sehingga akan memacu perkembangan dan pemerataan pembangunan. Dalam upaya tersebut, maka pemerintah daerah perlu memahami setiap potensi dan kemampuan daerah sehingga mampu untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal.

Pelayaran menggunakan kapal tradisional saat ini masih menjadi sarana angkutan yang penting terutama untuk mendistribusikan barang dan penumpang kewilayah kepulauan yang sangat sulit untuk dimasuki oleh jenis kapal lainnya karena keterbatasan fasilitas. Kapal tradisional biasanya dikelola secara tradisional oleh kelompok masyarakat menengah kebawah dengan pengetahuan tentang pelayaran yang sangat rendah seperti pembuatan dan perawatan kapal, cara bongkar muat kapal, keselamatan penumpang dan lainnya. Dengan segala kekurangan tersebut, peranan kapal tradisional masih sangat penting dalam menggerakkan perekonomian di wilayah kepulauan yang kecil sehingga perlu dilakukan langkah strategis untuk memastikan operasional kapal berjalan dengan teratur, nyaman, efisien dan yang paling utama berlayar dengan selamat.

Untuk meminimalisir kecelakaan pada pelayaran kapal tradisional perlu diterapkan strategi-strategi yang dapat diaplikasikan dalam keselamatan transportasi pelayaran yang menggunakan kapal tradisional. Kualitas sumber daya manusia pelayaran harus ditingkatkan khususnya awak kapal dengan melakukan pelatihan terutama dibidang nautis, teknis dan radio sehingga keselamatan pelayaran dapat terjamin. Peningkatan ketrampilan manajemen bagi pengusaha pengelola kapal tradisional dibidang ketatalaksanaan pelayaran juga dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keselamatan kapal dan penumpang, hal ini akan berpengaruh kepada pemilihan atau pembuatan kapal yang baik, perawatan kapal serta perekrutan awak kapal yang cakap.

Pengawasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengawasan melekat dan berfokus pada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. pengawasan melekat sangat penting dan diperlukan dalam setiap penyelenggaraan sehingga tujuan organisasi dapat di capai secara berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan dengan pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana yang tercantum pada keputusan menteri KEPMENPAN No.46 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat.

Perumusan Masalah

“Bagaimana Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Keselamatan Penumpang Angkutan Penyebrangan Kapal Ferry Tradisional di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Tujuan Penelitian

“Untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Keselamatan Penumpang Angkutan Penyebrangan Kapal Ferry Tradisional di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis : Sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sosiologi pedesaan dan sosiologi perkotaan dimana angkutan penyebrangan kapal ferry merupakan fasilitas sarana penghubung antara desa ke kota begitu juga sebaliknya yang perlu suatu bentuk pengawasan agar meningkatkan mutu dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik tersebut.
2. Manfaat Peraktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi pada pemerintah daerah khususnya dinas perhubungan sebagai acuan untuk perbaikan dan meningkatkan mutu pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Pengawasan

Menurut Murdick (dalam Fattah 2009: 101) “pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagai manapun rumit dan luasnya suatu organisasi”. Proses dasarnya menurutnya terdiri dari tiga tahap :

- 1) Menetapkan standar pelaksanaan.
- 2) Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar.
- 3) Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan setandar dan rencana.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . *the process of ensuring that actual activities conform the planned activities*. Stoner, Freeman, & Gilbert, 1995 (dikutip dalam Suryani, 2011 : 22)

Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.

Situmorang dan Juhir (1994:26) juga mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
3. Agar adanya keluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Fungsi-fungsi Pengawasan

Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemboosan-pemborosan.

Tindak Lanjut Pengawasan

- 1) Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang dimaksudkan di dalam pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang pengaturan disiplin pegawai negeri sipil.
- 2) Tindakan tuntutan atau gugatan perdata yaitu :
 - a. Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali.
 - b. Tuntutan perbendaharaan
 - c. Tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll.
- 3) Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindakan pidana khusus.
- 4) Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang kelembagan,

kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Pentingnya Pengawasan

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik. Disiplin yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai. Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswanto (dikutip dalam Suryani, 2011 : 38) adalah :

1. Perubahan lingkungan organisasi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi.
3. Kesalahan-kesalahan.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang.

Teknik Pengawasan

Menurut Sarwoto (1994 : 101) teknik pengawasan terbagi sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung, dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan, pengawasan berbentuk :
 - a. Inpeksi langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan, untuk mengetahui kebenaran situasi dilapangan.
 - b. Melakukan koreksi langsung, bila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan pada saat inspeksi langsung dilakukan.
 - c. Laporan ditempat, yaitu laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.
2. Pengawasan tidak langsung, pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan berbentuk :
 - a. Laporan tertulis, yaitu laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibutuhkan, dilaporkan secara berkala.
 - b. Laporan lisan, yaitu laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun saran-saran.

Pengertian Angkutan Penyeberangan Sungai

Usaha angkutan penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana,sarana dan perairan. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan, berfungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan atau jaringan jalur kereta api. (Keputusan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan). Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Definisi keselamatan dan keamanan pelayaran secara umum dapat dirujuk dari UU.No. 17/2008, tentang Pelayaran. Secara umum definisi tersebut adalah : Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Tingkat keselamatan ditunjukkan dalam parameter output, sedangkan tingkat jaminan keselamatan ditunjukkan dalam parameter input dan process. Parameter output keselamatan oleh statistik data kecelakaan per frekuensi kegiatan transportasi, yang dapat berupa jumlah kecelakaan, korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian finansial terukur.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2006:11) adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Fokus Penelitian

1. Pengawasan Langsung :
 - a. Inspeksi Langsung
 - b. Observasi ditempat
 - c. Laporan ditempat
2. Pengawasan tidak langsung :
 - a. Laporan tertulis
 - b. Laporan lisan

Lokasi Penelitian

- a. Lokasi atau tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana di daerah ini

terdapat pelabuhan yang menyediakan jasa angkutan penyebrangan kapal ferry tradisional.

- b. Alasan mengapa lokasi ini dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah karena kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga fungsi pengawasan kurang berjalan secara maksimal.

Sumber Data

a. Data Primer

Informan Kunci

1. Petugas pelabuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Data yang diperoleh secara langsung yaitu dari Petugas pelabuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara baik melalui wawancara maupun koisioner merupakan data murni mengenai "fungsi pengawasan dalam meningkatkan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional di Desa perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara"

Informan Pendukung

1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Masyarakat pengguna jasa penyebrangan kapal ferry
3. Pemilik kapal / nahkoda

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dan dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai adalah sumber literatur pendukung yang terkait dengan masalah yang peneliti angkat. Seperti studi kepustakaan/bahan-bahan bacaan untuk memperoleh teori, konsep maupun keterangan-keterangan melalui hasil-hasil penelitian, buku-buku, skripsi, jurnal, majalah, atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam melaksanakan proses penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian purposive sampling untuk mengambil sampel. Dalam hal ini bahwa penentuan informan didasarkan atas kriteria/ciri-ciri tertentu yang memungkinkan untuk mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya dari para informan di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Waktu/jadwal penelitian dilakukan

Teknik Analisis Data

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
- c. Penyimpulan dan Verifikasi
- d. Kesimpulan Akhir

Hasil penelitian

Pengawasan Langsung

a. Inspeksi Langsung

Pengawasan langsung dengan meninjau langsung kelapangan pada saat jam kerja atau jam beroperasi yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan bukan bersifat pemeriksaan, melainkan hanya berupa peninjauan dan monitoring guna melihat dan memastikan kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik kapal atau nahkoda kapal di lapangan berjalan dengan semestinya.

Bedasarkan wawancara salah satu pemilik kapal atau nahkoda kapal yaitu Bapak Irawan (35 Tahun) nahkoda kapal Cinta Andira, mengatakan bahwa :

"Inspeksi langsung yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan dengan meninjau dilapangan pada saat jam kerja atau jam beroperasi bermaksud untuk memastikan apakah nahkoda kapal melaksanakan peraturan-peraturan dalam penyeberangan, seperti kapasitas muat kapal. dan untuk mengetahui secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan dilapangan. Selain itu, juga untuk mengoreksi bila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pelayaran.".(wawancara : Bulan Agustus 2015)

Lebih lanjut berdasarkan wawancara kepada pemilik kapal atau nahkoda kapal yaitu Bapak Nur (35 Tahun) nahkoda kapal Delta Tenggara mengenai pengawasan langsung dari petugas Dinas Perhubungan, mengatakan bahwa :

"Dalam melaksanakan pengawasan langsung, petugas Dinas Perhubungan juga sering memantau langsung kelapangan dan mengamati kegiatan pelayaran, selain itu juga petugas memeriksa kelengkapan kapal seperti jaket pelampung karena apabila tidak menyediakan pelampung ferry tersebut dilarang untuk beroperasi, dinas perhubungan juga mengontrol kelayakkan kapal saat beroperasi". (wawancara : Bulan Agustus 2015)

Dengan adanya inspeksi langsung yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dengan meninjau secara langsung ke lapangan pada waktu jam kerja atau jam beroperasi, maka petugas Dinas Perhubungan akan mengetahui kebenaran dan situasi dilapangan. petugas Dinas Perhubungan melakukan monitoring atau peninjauan tersebut maka secara otomatis Pelaksanaan Keselamatan Penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional di Desa Perjiwa akan berjalan dengan lancar dan apabila di temukan hambatan-hambatan maka dengan segera akan terselesaikan.

Pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas perhubungan adalah pengawasan dalam meningkatkan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional di Desa Perjiwa. Selain itu, pengawasan

yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan diantaranya mengenai peraturan-peraturan yang di tetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pelayaran penyeberangan tradisional di Desa Perjiwa.

b. Observasi di Tempat

Untuk melaksanakan observasi tersebut, Dinas Perhubungan di bantu oleh staf-staf yang lainnya yang merupakan anggota tim pelaksana observasi tersebut. Observasi langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam satu bulan dilakukan sebanyak dua kali.

Berdasarkan Wawancara kepada Bapak Ari Takari Soekanto (42 tahun) selaku kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara :

“Dalam pelaksanaan kegiatan disetiap pelabuhan yang beroperasi, observasi ditempat sangatlah diperlukan, dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedisiplinan dari pemilik kapal dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara”. (Wawancara: Bulan Agustus 2015)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nopiar (42 tahun) petugas dermaga Dinas Perhubungan mengatakan :

“kami selaku petugas dinas perhubungan, selalu melakukan observasi langsung dan mengecek kelengkapan kapal seperti pelampung dan kelayakan kapal pada saat kapal belum beroperasi, jika kapal terlihat tidak layak untuk beroperasi kami akan mencabut ijin beroperasi kapal tersebut”. (Wawancara : Bulan Agustus 2015)

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa observasi ditempat adalah salah satu bentuk dari pengawasan secara langsung oleh petugas Dinas Perhubungan, pelaksanaannya dilakukan sebelum kegiatan/program dilaksanakan, untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan kedisiplinan dari pemilik kapal atau nahkoda kapal tersebut, apakah mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang di tetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Laporan Ditempat

Bedasarkan wawancara kepada Bapak Susminto (42 Tahun) sebagai petugas Dinas Perhubungan mengatakan bahwa :

“Laporan ditempat yang disampaikan oleh nahkoda secara langsung, adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi secara langsung untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada saat melakukan pelayaran, dan untuk mengetahui apa-apa saja yang belum dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan”. (wawancara : Bulan Agustus 2015)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nopiar (42 Tahun) petugas dermaga Dinas Perhubungan mengatakan :

“Laporan yang dilakukan secara langsung antara pemilik kapal kepada pegawai Dinas Perhubungan yang berada dilapangan, adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi secara langsung untuk mengetahui kendala-

kendala atau hambatan-hambatan apa saja yang mereka hadapi sehingga kami bisa langsung melaporkan langsung kepada Dinas Perhubungan pusat”. (wawancara : Bulan Agustus 2015)

Jadi pengawasan langsung, ialah melakukan pemantauan atau monitoring langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan atau pemantauan yang dilakukan dengan mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (*on the spot*), baik pemeriksaan secara administratif maupun fisik. Pengawasan langsung yang di maksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh petugas Dinas Perhubungan sebagai pengawas lapangan dan menjadi salah satu alat mencapai tujuan. Dengan cara inspeksi langsung, observasi ditempat, dan laporan ditempat yang disampaikan oleh pemilik kapal atau nahkoda kapal kepada petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai kartanegara pada saat melakukan inspeksi langsung atau observasi ditempat.

Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagai petugas pengawasan dari jarak jauh dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian melalui laporan masyarakat pengguna jasa penyeberangan maupun masyarakat sekitar. Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang efektif dan efisien maka petugas mempercayai masyarakat pengguna jasa penyeberangan maupun masyarakat sekitar sebagai pelaksana pengawasan apabila petugas sedang tidak berada dilapangan atau ditempat.

Menurut Bapak Nopiar (42 Tahun) petugas dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mengatakan bahwa :

“Langkah kedua pengawasan sebagai pendukung pengawasan langsung, maka perlu diadakanya pengawasan tidak langsung agar proses pengawasan dapat berjalan secara terus menerus, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Mengenai pengawasan tidak langsung yaitu kami mempercayakan kepada masyarakat sekitar jika kami tidak ada di tempat ”. (Wawancara : Bulan Agustus 2015)

Menurut bapak Susminto (42 Tahun) petugas Dinas Perhubungan mengatakan bahwa :

“Untuk mengenai pengawasan tidak langsung kami mempercayai warga sekitar dikarenakan kami tidak terus menerus ada di tempat, yaa dikarenakan kami juga harus beristirahat dan mungkin ada keperluan juga di tempat lain”. (Wawancara : Bulan Agustus 2015)

Dalam hal ini kepala pusat Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara menerima laporan dari petugas lapangan untuk melakukan evaluasi, yang berbentuk :

a. Laporan Tertulis

Laporan yang disampaikan oleh petugas lapangan maupun staf-staf yang lain dalam bentuk laporan tentang kegiatan dan dilaporkan secara berkala.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat penulis gambarkan bahwa dengan adanya laporan dari petugas lapangan maupun staf-staf Dinas Perhubungan, maka sangat membantu pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi mengenai fungsi pengawasan dalam meningkatkan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional di Desa Perjiwa.

Jadi dapat dikatakan bahwa laporan tertulis adalah bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui buku laporan kegiatan yang dilaporkan secara berkala oleh para staf, sehingga pemerintah pusat dapat mengetahui apa saja yang terjadi dilapangan melalui laporan petugas lapangan Dinas Perhubungan tersebut, dan melalui laporan petugas lapangan tersebut pemerintah pusat juga mudah dalam melakukan evaluasi dan mengontrol apa yang terjadi di pelabuhan penyeberangan. Semua diperkuat pula dengan hasil wawancara dibawah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nopiar (42 Tahun) petugas dermaga Dinas perhubungan mengatakan bahwa :

“Untuk mengenai laporan tertulis maupun lisan dari pemilik kapal sie tidak ada, untuk laporan tertulis kami selalu membuat laporan kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat tidak hanya menerima laporan dari satu petugas lapangan saja tetapi juga melalui staf-staf yang lainnya. Tujuannya agar dapat melihat perbandingan dari laporan yang diterima dari hasil kerja pemilik kapal atau nahkoda kapal yang dilakukan sehari-hari”.
(wawancara : Bulan Agustus 2015)

Menurut bapak Handoko (27 Tahun), bapak Iwan (23 Tahun), bapak Irfan (29 Tahun) petugas Dinas Perhubungan mengatakan bahwa :

“Untuk laporan tertulis dari nahkoda sie gaada, biasanya mereka hanya laporan lewat lisan saja dan lalu kami catat”. (Wawancara : Bulan Agustus 2015)

Lebih lanjut lagi kepada kepala Dinas Perhubungan yaitu bapak Ari Takari Soekanto (42 Tahun) mengatakan bahwa :

“Dengan adanya laporan tertulis dari Petugas lapangan maka akan mempermudah saya dalam mengontrol apa saja yang terjadi di lapangan” (wawancara : Bulan Agustus 2015)

b. *Laporan Lisan*

Laporan yang disampaikan masyarakat kepada petugas lapangan maupun staf-staf yang lain secara langsung mengenai kendala-kendala yang dihadapi dilapangan, baik berupa penyimpangan maupun saran-saran. Sedangkan untuk laporan secara lisan.

Menurut kepada bapak Nopiar (42 Tahun) petugas dermaga Dinas Perhubungan mengatakan bahwa :

“Kami biasanya mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar mengenai berbagai saran-saran atau hambatan dalam pelaksanaan meningkatkan pengawasan secara langsung sehingga kami dapat melaporkan kepada pemerintah pusat agar keinginan yang diharapkan masyarakat bisa berjalan dengan semestinya, dan apa yang menjadi harapan masyarakat

dapat terwujud dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasa". (Wawancara : Bulan Agustus 2015)

Menurut bapak Handoko (27 Tahun), bapak Iwan (23 Tahun), bapak Irfan (29 Tahun) petugas Dinas Perhubungan mengatakan bahwa :

“Secara tidak langsung kami biasanya mengobrol atau bertanya-tanya dengan masyarakat sekitar kami terkadang menerima laporan lisan dari masyarakat mengenai pelayanan di dalam kapal, dan terkadang masyarakat juga merasa was-was terhadap kapasitas daya angkut kapal”. (Wawancara : Bualan Agustus 2015)

Jadi pengawasan tidak langsung adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap obyek yang diawasi atau dengan kata lain pengawasan tidak langsung itu dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis segala fenomena yang menyangkut obyek yang diawasi, yaitu melalui laporan tertulis yang dibuat maupun laporan lisan secara berkala.

Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu ialah sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain para bawahan itu mempunyai kecendrungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan. Padahal pimpinan yang baik akan menuntut bawahannya untuk melaporkan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Sebabnya ialah bahwa kalau hanya hal-hal yang positif saja yang dilaporkan, pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya, akibatnya ialah bahwa dia akan mengambil kesimpulan yang salah.

Pengawasan tidak langsung ini juga sebagai upaya memberi dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan seluruh aspek manajemen, baik yang menyangkut kebijaksanaan maupun perencanaan, organisasi, prosedur, manual, standar, kriteria, dan tolak ukur, sehingga proses pencapaian tujuan yang efektif dan efisien dapat terwujud.

Jadi pengawasan tidak langsung terhadap kegiatan yang dilakukan sebatas hasil laporan yang dibuat secara berkala, baik dalam bentuk laporan bulanan, triwulan maupun rekapitulasi dalam satu tahun. Masing-masing unit kerja diwajibkan untuk melakukan evaluasi sesuai prestasi yang dicapai, dan selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan sebagai mana yang diwajibkan.

Pengawasan tidak akan berjalan dengan baik, apabila hanya bergantung pada laporan saja. Karena itu pengawasan tidak langsung tidak cukup. Adalah bijak sana apabila pimpinan organisasi menggabungkan tehnik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan ini.

Wawancara terhadap masyarakat mengenai pengawasan DISHUB menurut bapak Tarmiji (29 Tahun), Muhriansyah (29 tahun) mengatakan bahwa :

“menurut kami selama kami menggunakan jasa penyeberangan pengawasan yang di lakukan oleh DISHUB sudah cukup bagus mereka selalu mengontrol jalanya penyeberangan semenjak terjadinya kecelakaan

waktu itu. Dan setau kami, dari DISHUB juga menghimbau kepada nahkoda untuk selalu memperhatikan keadaan jangan sampai terjadi kesalahan yang tak diinginkan”. (Wawancara : Agustus 2015)

Menurut Nia (23 tahun), Safitri (25 tahun), Irma (23 tahun) mengatakan bahwa :

“kalau berbicara tentang pengawasan yaa cukup penting sekali yaa kalau di lihat dari pengawasannya yaa bagus-bagus aja mereka selalu mengontrol jalanya pelayaran di pelabuhan, dan sehingga pemilik kapal bisa patuh terhadap aturan-aturan. Meskipun terkadang mereka suka kucing-kucingan kepada petugas.. jadi menurut kami sie harus lebih diperketat lagi untuk pengawasannya biar tidak terulang lagi kecelakaan seperti waktu itu di karenakan kelebihan muatan”. (Wawancara : Agustus 2015)

Dari hasil wawancara terhadap masyarakat mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan sudah cukup optimal meskipun masih ada oknum-oknum dari pemilik kapal yang melakukan pelanggaran. Jadi pengawasan harus lebih diperketat lagi sehingga pemilik kapal tidak berani untuk melakukan pelanggaran.

Kesimpulan

- a. Pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan dalam meningkatkan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan cara mengadakan inspeksi langsung/peninjau kelapangan pada saat jam beroperasi, melakukan koreksi bila terjadi kesalahan. Inspeksi langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan dibantu oleh pegawai lapangan dan staf-staf yang lainnya yang bergabung dalam sebuah tim.
- b. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui laporan pegawai lapangan dan laporan masyarakat pengguna jasa penyeberangan maupun masyarakat sekitar Yang berbentuk laporan lisan dan laporan tertulis. Dengan ditambah dengan adanya pengawasan secara tidak langsung yang berbentuk laporan lisan, Dinas Perhubungan dengan mudah melakukan evaluasi terhadap pemilik kapal atau nahkoda kapal dan langsung memberikan teguran terhadap pemilik kapal atau nahkoda kapal, sehingga kedepannya dapat ditingkatkan lagi fungsi pengawasan dalam meningkatkan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Saran

1. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara untuk lebih meningkatkan lagi frekuensi inspeksi langsung menjadi lebih sering yaitu pada saat Dinas Perhubungan mengadakan inspeksi langsung ada baiknya

- sosialisasi dalam menggunakan alat pengamanan lebih ditingkatkan lagi dan jika pemilik kapal atau nahkoda kapal melakukan kesalahan atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan harap segera di laporkan kepada petugas Dinas Perhubungan.
2. Pada pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan harus lebih ditingkatkan lagi yaitu kualitas tenaga kerja dalam memeriksa laporan dari pegawai lapangan secara tulisan maupun melalui lisan yaitu dengan cara mengecek apakah kegiatan dilapangan sudah terpenuhi, Yaitu sesuai dengan yang direncanakan atau belum.
 3. Dikarenakan masih adanya pelanggaran yang dilakukn oleh pemilik kapal, diharapkan kepada Dinas Perhubungan untuk lebih ditingkatkan lagi dalam pengawasannya. Sehingga dengan adanya peningkatan pengawasan dari Dinas Perhubungan maka pemilik kapal tersebut tidak akan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.
 4. Berkaitan dengan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan sebagai pelayanan masyarakat dalam meningkatkan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional di Desa Perjiwa, diharapkan untuk lebih dimaksimalkan lagi yaitu pemerintah Dinas Perhubungan harus mempunyai tenaga ahli yang berkualitas dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional di Desa Perjiwa secara efektif dan efisien, sehingga apa yang diinginkan oleh semua pihak dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Sumber refrensi

- Ainur Rasidah. 2013. *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PENYEBERANGAN FERRY TRADISONAL (Study pada masyarakat pengguna Jasa penyeberangan sungai di desa perjiwa kec.tenggarong seberang kab.kutai kartanegara)*. Samarinda : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (skripsi)
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. *Kajian dan Survey Armada Angkutan Laut Pasca Roadmap Inpres 5/2005*. Jakarta, Dhiksa Intertama.
- Fattah, Nanang. 2009. *Landasan Manajemen Pendidikan*. PT. Rosda Karya. Bandung.
- Fathoni Abdurrahmat, 2006, *Organisasi dan Manajemen*, cetakan pertama, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta
- Hanok Mandaku. Agustus 2012. *Sebuah Analisis Tentang Sebab-Sebab Kejadian Kecelakaan KM. Putri Ayu di Perairan Pulau Ambon-Maluku*. ejournal Teknik Industri .Volume 6. Nomor 2.
- Moleong, Lexy.J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya : Bandung.
- Pura, Hasim. 2005 *Hukum Pengangkutan di Laut*. Medan: Pusaka Bangsa

- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, *Dasar-dasar Manajemen*, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPF, Yogyakarta
- Sarwoto, 2010, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, cetakan keenambelas, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sigian Sondang. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Indonesia. Bandung: CV. Alfabeta
- Siswandi dan Indra Iman, 2009, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, edisi kedua, Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta
- Sugianto. 2001 "Tinjauan mengenai pelaksanaan keselamatan kerja di PT. Kalihold Utama Plywood: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Sujarweni V.Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Penerbit : PT. PUSTAKA BARU, Bantul Yogyakarta.
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta
- Suryanti Fabanyo. 2011. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan*. Makassar. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin (skripsi)
- Soetopo. H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian)*. Sebelas Maret University Press : Surakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010, *Dasar-dasar Manajemen*, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Sumber Internet :
- _____. 2015 Peraturan Menteri. hubdat.dephub.go.id Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, No: PM 25 Tahun 2015. (Diakses 18 Mei 2015)
- _____. <http://daerah.sindonews.com/read/960173/25/tindak-tegas-pemilik-kapal-tenggelam-di-tenggarong-1423057575>). (Diakses 13 Januari 2015)
- _____. <http://dishubkomintel.acehprov.go.id/index.php/news/read/2014/08/08/12/keselamatan-pelayaran-kapal-tradisional.html>. (Diakses 13 Januari 2015)
- _____. KEPMENPAN No.46 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/kmpan46-04.htm>, (Diakses 19 November 2015).
- _____. <http://www.kutaikartanegara.com/kabupaten/kecamatan.jpg>. (Diakses 02 Desember 2015.)